

Komunikasi Efektif Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Ekonomi Desa

Susan Novitasari*¹, Alya Rizky Rosada²

^{1,2}Universitas Gresik

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

*e-mail: susannovitasari@unigres.ac.id¹

Abstrak

Pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa. Adapun penulis manfaat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah desa dalam upaya pembentukan badan usaha milik desa. dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan jenis penelitian kualitatif adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi unit analisisnya adalah kepala desa beserta perangkat desa sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif Dalam strategi peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa, sesuai dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga belum dapat memutuskan suatu keputusan bersama masyarakat desa secara musyawarah, dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum juga dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi bersama seluruh masyarakat Desa Kemiri. Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembentukan badan usaha milik desa BUM Desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan desa..

Kata kunci: Komunikasi Desa; Ekonomi Desa

1. PENDAHULUAN

Desa adalah komunitas kecil pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia saling “berhubungan” atau dengan istilah ilmiah yaitu saling “berinteraksi” sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada setiap warganya, sehingga membedakan

antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekarno, 2006 : 22). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada masyarakat yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dan menggabungkan dengan kebudayaan yang sudah ada, dan masyarakat yang bersifat tertutup yang mana dalam masyarakat ini cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan yang tidak biasa mereka jalankan selama ini, masyarakat ini biasanya pada masyarakat yang masih tradisional dan biasanya tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Pemerintah desa sebagai level pemerintahan terendah, sejatinya dalam era otonomi daerah memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Meskipun faktanya pemerintah desa lebih banyak menangani persoalan administrasi, namun fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kurang terdengar. Pemerintah sendiri seperti double standar dalam melihat pemerintah desa. Di satu pihak pemerintah mendorong agarkedudukan pemerintah desa lebih kuat, tapi di pihak lain, dalam pelaksanaan program pembangunan, perannya seringkali dipinggirkan. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikelola kementerian/lembaga melakukan langsung (top down) ke masyarakat melalui skema BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Biasanya pemerintah desa baru dilibatkan bila ada masalah yang ditemui. Kondisi inilah yang banyak dikeluhkan aparat desa di lapangan. Sepertinya berbagai pihak di pusat masih belum rela memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 4 kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru dan perlu landasan hukum yang kuat. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Bab X UU Desa No 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan : a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin memahami, mengamati, menggali, dan mengungkapkan secara lebih mendalam tentang peran BUMDes dalam mendukung pengembangan ekonomi desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain itu, tim pendamping juga membuat draft tentang ketentuan dan prosedur pembelian, penjualan dan pertanggung jawabannya ke BUMDes dan kepala Desa. Setelah melakukan pelatihan pemanfaatan *Microsoft Excel (Ms. Excel)* beberapa kali dan mitra dianggap telah mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, neraca, dan arus kas yang merupakan standar pelaporan keuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Untuk pelatihan pembuatan laporan keuangan, tim pendamping perlu mengulang/melakukan beberapa kali. Hal ini terjadi, karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya. Namun setelah melewati proses latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, tim melihat bahwa mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan-bulan berikutnya.

4. KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dan peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2007. Surabaya. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Avilliani. 2012. *Kemandirian Ekonomi*. UIN: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Department For International Development (DFID). 2003. "The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction". Policy Division Working Paper.

Hayyuna R, Pratiwi RN, Mindarti LI. 2014. Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomor 1*. Diunduh Pada 1 Desember 2016. <http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/330>

Mikkelsen, B. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Terjemahan Matheos Nalle), Edisi Ketiga, Februari 2003.

Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Notoatmodjo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Cetakan 2. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Nugraha, Mahendra Adi. 2014. *Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Implikasinya bagi Kemandirian Ekonomi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang. Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.